

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 – 2020)**

***THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE  
AND FINANCIAL PERFORMANCE ON CAPITAL EXPENDITURE  
(Case Study on Provincial Governments in Indonesia in 2019 – 2020)***

Dewi Ayu Wulandari<sup>1</sup>, Sri Rahayu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Telkom, Bandung

uwiwulandari@telkomuniversity.ac.id<sup>1</sup>, srrahayu@telkomuniversity.ac.id<sup>2</sup>

---

**Abstrak**

Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan dalam mendukung pemenuhan sarana dan prasarana bagi kebutuhan publik. Dalam pelaksanaannya di lapangan, belanja modal terus mengalami penurunan setiap tahunnya jika dibandingkan dengan belanja lain seperti belanja pegawai dan belanja barang, serta terjadinya penyebaran Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah melakukan pemangkasan belanja modal sekurang-kurangnya 50% dari anggaran yang seharusnya.

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kuantitatif. Teknik yang digunakan adalah *sampling jenuh*, dengan populasi sampel Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk semester I tahun 2019 dan 2020, sehingga jumlah sampel sebanyak 68 unit. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan software *Eviews 9*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan *common effect model*. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Secara parsial, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk dapat meningkatkan belanja modal. Diharapkan anggaran belanja dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik melalui belanja modal.

**Kata kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan dan Belanja modal*

---

**Abstract**

*Capital expenditures are expenditures made to support the fulfillment of facilities and infrastructure for public needs. In its implementation in the field, capital expenditures continue to decline every year when compared to other expenditures such as personnel expenditures and goods expenditures, as well as the spread of Covid-19 in Indonesia, which has forced the government to cut capital expenditures at least 50% of the budget it should have.*

*This study uses quantitative methods. The technique used is purposive sampling, with a sample population of the Provincial Government in Indonesia for the first semester of 2019 and 2020, so the number of samples is 68 units. The data analysis method used is panel data regression using Eviews 9 software.*

*Based on the results of the research conducted, this study uses the common effect model. Where the results of the study indicate that local government revenue, the remaining budget balance, and financial performance have a simultaneous effect on capital expenditure. Partially, local government revenue has a significant positive effect on capital expenditure and financial performance has no effect on capital expenditure.*

*The results of this study are expected to provide an overview to the government as a consideration or evaluation of the performance of government agencies in making decisions to increase capital expenditures. It is hoped that the expenditure budget can be used to improve public service facilities through capital expenditures.*

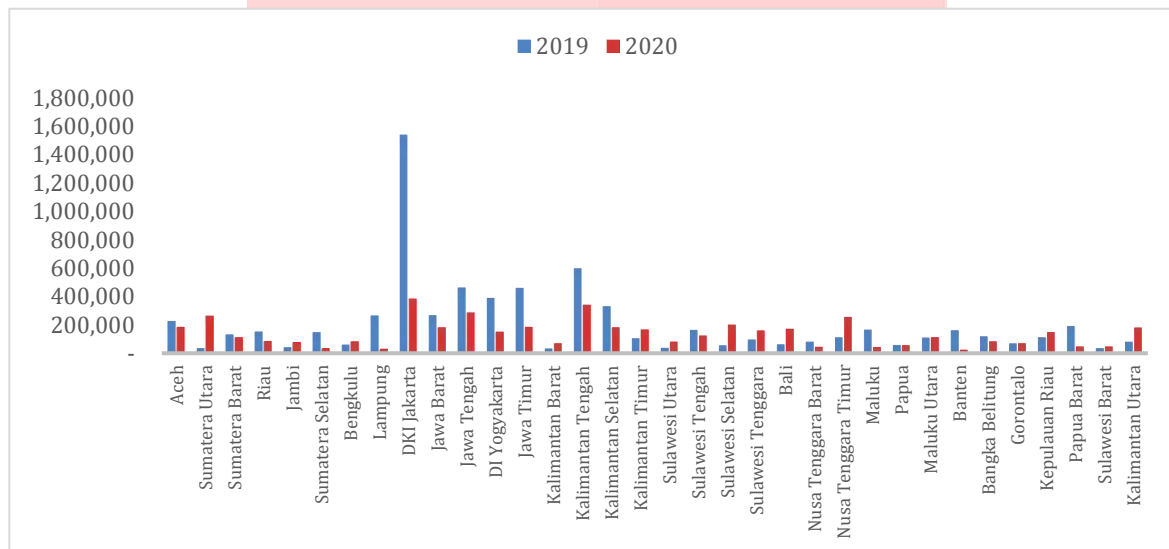
**Keywords:** *local government revenue, financial performance and capital expenditure*

---

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan belanja yang dilakukan dalam mendukung pemenuhan prasarana bagi kebutuhan publik berupa belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap, dan belanja aset lainnya atas kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah.<sup>[1]</sup>

Sebagaimana yang dimaksud di atas belanja modal merupakan biaya pengeluaran untuk membangun infrastruktur publik yang berguna dalam kepentingan publik dan pemerintahan<sup>[2]</sup>. Namun, dalam perkembangannya belanja modal terus mengalami penurunan dibandingkan belanja yang lainnya<sup>[3]</sup>. Dengan belanja modal yang menurun menunjukkan bahwa belanja yang ada tidak memadai dan tidak menunjukkan penambahan yang signifikan jika dilihat dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menjadikan investor swasta nasional maupun investor asing memilih untuk tidak berinvestasi di daerah<sup>[4]</sup> serta berpotensi menimbulkan kerugian publik. Berikut gambar data mengenai realisasi belanja modal tahun 2019 dan 2020 pada pemerintah provinsi di Indonesia:



**Gambar 1.1**

### **Perkembangan Realisasi Belanja Modal (dalam miliar)**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan perkembangan realisasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019 dan 2020. Realisasi belanja modal pada tahun 2019 dan 2020 pada 34 provinsi memiliki kecenderungan menurun. Dimana pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp 6.985.742.998.118, sedangkan pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 4.680.663.433.990. Hal ini membuat realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp 2.305.079.564.128 atau 33% dari tahun sebelumnya. Penurunan belanja modal ini merupakan salah satu faktor dari pemerintah yang mengubah skema proyek dari *single year* menjadi *multiyears* yang disebabkan terjadinya pemangkasan belanja modal<sup>[5]</sup>.

Dengan demikian perubahan skema proyek tersebut membuat belanja modal menurun yang disebabkan terjadinya penyebaran Covid – 19 di Indonesia, sehingga pemerintah pengelolaan anggaran mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April mengenai *refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Terjadinya *refocusing* yang mengharuskan pemerintah merubah alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di daerah. Dengan perubahan tersebut membuat adanya pemangkasan sekurang – kurangnya 50% dari anggaran seharusnya<sup>[6]</sup>.

## 2. Dasar Teori dan Metodologi

### 2.1 Dasar Teori

#### 2.1.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah<sup>[7]</sup>. Pendapatan asli daerah digunakan untuk mewujudkan desentralisasi yang mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Pendapatan yang terus meningkat akan mempengaruhi dana yang dimiliki pemerintah daerah menjadi semakin tinggi. Dengan begitu, menunjukkan bahwa tingginya pendapatan akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal. Dengan demikian pendapatan asli

daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, yaitu semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pengeluaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan, pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan belanja modal dalam meningkatkan pembangunan daerah maupun peningkatan sarana dan prasarana. Pernyataan tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh <sup>[8]</sup> yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

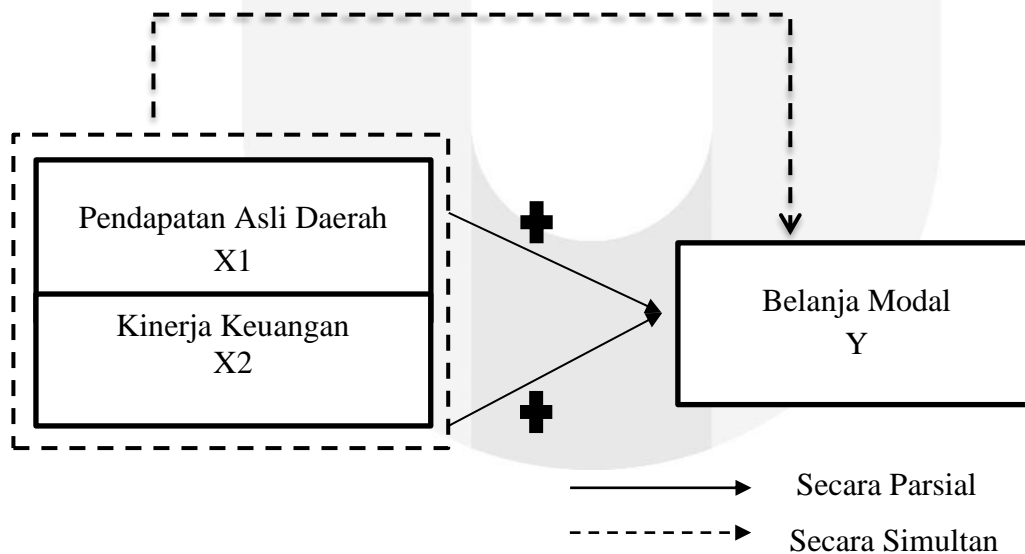
**H1 = Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.**

### 2.1.2 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal

Kinerja keuangan merupakan salah satu pengukuran pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan untuk dapat mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya <sup>[9]</sup>. Kinerja keuangan dapat dikatakan baik jika sesuai dengan rencana yang telah dibuat, dimana pemerintah daerah harus mengelola keuangan secara efisien. Menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah untuk dapat mengetahui seberapa efisien anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan suatu kegiatan <sup>[10]</sup>. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara pengeluaran belanja dan penerimaan pendapatan pada periode tersebut. Rasio efisiensi ini digunakan untuk menggambarkan pemerintah dalam pengeluaran belanja daerah. Dengan begitu, menunjukkan bahwa semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah akan mempengaruhi belanja daerah yang akan dikeluarkan pemerintah dalam membiayai belanja modal. Dengan demikian kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, yaitu semakin kecil rasio efisiensi maka semakin tinggi belanja modal yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan, rasio efisiensi merupakan sumber pembiayaan belanja modal. Dengan pemerintah melakukan efisiensi pada keuangan daerah diharapkan pemerintah dapat melakukan pengeluaran daerah pada pos belanja modal sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah dan infrastruktur daerah. Pernyataan tersebut searah dengan penelitian <sup>[11]</sup> yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh secara signifikan positif terhadap belanja modal.

**H2 = Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap belanja modal**

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

*Sumber: Data yang telah diolah, 2021*

## 2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data sekunder dengan menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Data penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2019 – 2020. Teknik yang digunakan adalah sampling jenuh, dengan populasi sampel Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk semester I tahun 2019 dan Semester I tahun 2020, sehingga jumlah sampel dalam penelitian 68 unit sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 9*. Persamaan analisis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian adalah:

$$Y = \alpha + b1X1it + b2X2it + e$$

Keterangan :

Y : Belanja Modal

$\alpha$  : Konstanta

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Kinerja Keuangan

e : Error term

### 3. Pembahasan

Pembahasan dalam jurnal ini akan membahas mengenai analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi data panel dan pengaruh untuk setiap variabelnya. Berikut penjelasannya:

Statistik deskriptif adalah metode statistik analisis data yang digunakan dalam menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa maksud untuk ditarik kesimpulan umum dari data tersebut atau umumnya menggambarkan keadaan data yang sebenarnya<sup>[12]</sup>. Penyajian data ini memiliki tujuan agar dapat menjelaskan secara deskriptif dari variabel penelitian. Deskripsi data menggunakan penjelasan kelompok nilai *minimum*, nilai *maximum*, dan nilai rata – rata (*mean*). Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

	PAD	KK	BM
Mean	27.57301	0.774234	25.50595
Median	27.53370	0.706721	25.48352
Maximum	30.47779	2.798828	28.06118
Minimum	24.69500	0.476558	23.91882
Std. Dev.	1.219362	0.301956	0.813655
Skewness	0.355438	4.736698	0.357330
Kurtosis	2.895583	31.41315	3.146489
Observations	68	68	68

Sumber : Data yang diolah, *Eviews 9* (2021)

Berdasarkan hasil pengujian analisis statistik deskriptif di atas pada tabel 3.1. Variabel belanja modal (BM) memiliki nilai *mean* sebesar 25.50595. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan *standar deviasi* sebesar 0.813655. Nilai *maximum* pada variabel belanja modal adalah sebesar 28.06118 yang dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Sedangkan nilai *minimum* di variabel belanja modal adalah sebesar 23.91882 yang dimiliki provinsi Banten pada tahun 2020. Variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai *mean* sebesar 27.57301. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan dengan nilai *standar deviasi* sebesar 1.219362. Nilai *maximum* pada variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 30.47779 yang dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Sedangkan nilai *minimum* adalah sebesar 24.69500 yang dimiliki oleh provinsi Maluku Utara pada tahun 2020. Variabel kinerja keuangan (KK) pada pemerintah daerah provinsi Indonesia tahun 2019 dan 2020 memiliki *mean* sebesar 0.774234. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan *standar deviasi* sebesar 0.301956. Nilai *maximum* pada variabel kinerja keuangan adalah sebesar 2.798828 yang dimiliki oleh provinsi Bengkulu atau dikategorikan tidak efisien pada tahun 2019. Sedangkan nilai *minimum* pada variabel kinerja keuangan adalah sebesar 0.476558 yang dimiliki oleh provinsi Nusa Tenggara Timur atau dikategorikan sangat efisien pada tahun 2019.

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas pada model regresi<sup>[13]</sup>. Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini, pada uji *normalitas* menunjukkan bahwa data peneliti memiliki nilai *Probability* sebesar 0,631940 atau lebih dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau dapat dikatakan data penelitian berdistribusi normal. Pada uji *multikolinearitas* menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan kinerja keuangan (KK) kurang dari 0,8. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau dapat dikatakan tidak terjadi gejala *multikolinieritas* dalam data penelitian. Pada uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan uji *white* memiliki nilai *Prob Chi-Square* sebesar 0,2708 atau lebih dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau dapat dikatakan tidak terjadi *heteroskedastisitas* dalam data penelitian. Dan pada uji *autokorelasi* dengan menggunakan uji LM (*Metode Breusch Godfrey*) memiliki nilai *Prob Chi-Square* sebesar 0,5530 atau lebih dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau dapat dikatakan tidak terindikasi adanya *autokorelasi* dalam data penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak memiliki masalah dalam uji asumsi klasik sehingga dapat meneruskan pada pengujian lainnya.

Analisis regresi data panel merupakan gabungan antara data time series dan cross section disebut analisis regresi data panel<sup>[14]</sup>. Dimana dalam menentukan regresi data panel yang cocok dalam penelitian terlebih dahulu melakukan pemilihan model estimasi regresi data panel yang pengujiannya terdiri dari uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*.

Hasil pemilihan model estimasi regresi data panel yang telah dilakukan pada uji *chow* menunjukkan bahwa profitabilitas *cross - section Chi-square* sebesar  $0,0027 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan model yang diterima penelitian ini adalah model *fixed effect*. Selanjutnya ada uji *hausman* menunjukkan bahwa nilai profitabilitas *cross - section random* sebesar  $0,9362 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan model yang diterima penelitian ini adalah model *random effect*. Dan pengujian terakhir yaitu uji *lagrange multiplier* menunjukkan bahwa nilai profitabilitas *Breusch-Pagan* sebesar  $0,2514 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan model yang baik di penelitian ini adalah model *common effect*. Berikut tabel 3.3 yang menunjukkan hasil uji *common effect*:

**Tabel 3.2**  
**Hasil Uji Regresi Data Panel**

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Date: 09/08/21 Time: 19:26

Sample: 2019 2020

Periods included: 2

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 68

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.70503	2.078692	8.036317	0.0000
PAD	0.313099	0.073812	4.241872	0.0001
KK	0.216765	0.298067	0.727236	0.4697
R-squared	0.217172	Mean dependent var		25.50595
Adjusted R-squared	0.193085	S.D. dependent var		0.813655
S.E. of regression	0.730894	Akaike info criterion		2.254018
Sum squared resid	34.72340	Schwarz criterion		2.351938
Log likelihood	-73.63663	Hannan-Quinn criter.		2.292817
F-statistic	9.016134	Durbin-Watson stat		1.610541
Prob(F-statistic)	0.000350			

Sumber : Data yang telah diolah *Eviews 9* (2021)

Berdasarkan tabel 5 maka dapat dirumuskan persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 16.70503 + 0.313099 X_1 + 0.216765 X_2 + e$$

Penjelasan persamaan regresi diatas diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 10.98313 artinya jika pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan dianggap bernilai konstan, maka nilai besarnya belanja modal adalah 16.70503 setiap provinsinya.
2. Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,374570 artinya, setiap terjadinya peningkatan dalam pendapatan asli daerah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,313099 dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan).
3. Nilai koefisien regresi kinerja keuangan sebesar 0,216765 artinya, setiap terjadinya peningkatan dalam kinerja keuangan pada rasio efisiensi keuangan daerah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,214075 dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan).



Berdasarkan hasil tabel 3.2 di atas pada koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dapat diketahui bahwa *Adjusted R-squared* model penelitian adalah sebesar 0,193085 atau 19,3085%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2019 dan 2020 sebesar 19,3085%, sedangkan sisanya 80,6915% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Pada uji *statistic F* dapat diketahui bahwa *Prob (F-statistic)* sebesar 0,000350. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, berarti variabel independen di penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan secara simultan bersama – sama berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2019 dan 2020. Dan pada uji statistik *t* Nilai *probability (T-statistic)* sebesar  $0,0001 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, Nilai *probability (T-statistic)* sebesar  $0,4697 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil tabel 3.2 di atas dapat di atas, berikut merupakan pembahasan hasil uji regresi data panel pada variabel pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia semester I tahun 2019 – 2020:

**a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan nilai *probability (T-statistic)* pendapatan asli daerah sebesar 0,0001. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  $0,0001 < 0,05$ , maka disimpulkan bahwa  $H_{01}$  ditolak, atau dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019 – 2020. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang dibangun oleh penulis yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. Dapat dilihat terdapat 22 dari 68 sampel atau sebesar 32% sampel memiliki nilai PAD di atas rata – rata yang diikuti dengan belanja modal di atas rata – rata. Sedangkan 19 dari 68 sampel atau sebesar 28% sampel memiliki nilai PAD di bawah rata – rata yang diikuti dengan belanja modal di bawah rata – rata. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh <sup>[8]</sup> yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap belanja modal.

**b. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan nilai *probability (T-statistic)* kinerja keuangan sebesar 0,4697. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  $0,4697 > 0,05$ , maka disimpulkan bahwa  $H_{02}$  diterima, atau dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. Kinerja keuangan berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019 – 2020. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang telah dibangun oleh peneliti yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dapat dilihat bahwa 22 dari 68 sampel atau sebesar 32% sampel memiliki kinerja keuangan efisien yang diikuti dengan belanja modal di atas rata – rata. Sedangkan 7 dari 68 sampel atau 10% sampel memiliki nilai kinerja keuangan sangat efisien yang diikuti dengan belanja modal di bawah rata – rata. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh <sup>[15]</sup> yang menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

**4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial hanya pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

**Referensi:**

- [1] P. Indonesia, "Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," Selasa Maret 2015. [Online]. Available: <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-kepala-lkpp/peraturan-kepala-lkpp-nomor-6-tahun-2015>.
- [2] M. Abid, S. Rahayu and W. Aminah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal," *e-Proceeding of Management*, p. 753, 2018.
- [3] G. Olivia and T. Mahadi, "Belanja modal tumbuh lambat lima tahun terakhir, pemerintah diminta tambah pagu," Kamis Juni 2019. [Online]. Available: <https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-modal-tumbuh-lambat-lima-tahun-terakhir-pemerintah-diminta-tambah-pagu>. [Accessed Jumat Maret 2021].
- [4] L. M. Kasdy, Nadirsyah and H. Fahlevi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia," *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 2018.
- [5] R. Anjaeni and W. T. Rahmawati, "Belanja modal pemerintah yang ditunda tahun 2020 mencapai Rp 493 miliar," Rabu Juni 2020. [Online]. Available: <https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-modal-pemerintah-yang-ditunda-tahun-2020-mencapai-rp-493-miliar>. [Accessed Jumat Maret 2021].
- [6] P. Indonesia, "Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 177/ KMK.07/2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional," Kamis April 2020. [Online]. Available: <https://kkp.go.id/djprl/jaskel/artikel/18646-keputusan-bersama-menteri-dalam-negeri-dan-menteri-keuangan-nomor-119-2813-sj-nomor-177-kmk-07-2020-tentang-percepatan-penyesuaian-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-2020-dalam-rangka-penanganan-coron>. [Accessed Kamis September 2020].
- [7] P. Indonesia, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah," Jumat Oktober 2004. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>.
- [8] K. W. Jati, Subowo, W. Ilmiyana and M. P. Sari, "Pengaruh PAD, DAU Beban, dan Karyawan di Belanja Modal dengan Kepadatan Penduduk sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Dinamika Akuntansi*, pp. 132-140, 2019.
- [9] I. Wahyudin and Hastuti, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat," *Indonesian Accounting Research Journal*, pp. 86-97, 2020.
- [10] R. D. Utami dan K. Julian, "Pengaruh Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak," *The Asia Pacific Journal of Management*, pp. Vol.4 No.1 ISSN: 2407-6325, 2017.
- [11] R. S. Putri dan S. Rahayu, "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat," *JASa ( Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi )*, pp. Vol.3 No.2 P-ISSN 2550-0732 / E-ISSN 2655-8319, 2019.
- [12] D. Sudaryono, "Statistik Deskriptif dan Inferensial," in *Metode Penelitian*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018, p. 348.
- [13] R. A. Purnomo, "Uji Asumsi Klasik Regresi," in *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis*, Ponorogo, CV.WADE GROUP, 2017, p. 107.
- [14] S. R. Ajija, D. W. Sari, R. H. Setianto and M. R. Primanti, "Uji Asumsi Klasik," in *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, Jakarta, Salemba Empat, 2020, pp. 35-38.
- [15] K. K. Bolen, "The effect of financial performance and balanced funds on capital expenditure of local government in district/city in Indonesia," *Journal of public administration and governance*, 2019.